



Manajemen Pelayanan Kesehatan Guna Kesiapan Jamaah Haji Kota Banda Aceh

Fakhruddin, Nurul Hasanah, Khairul Habibi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

f4khrudd1n@ar-raniry.ac.id, Nurulhasanahmanik@gmail.com, khairul.habibi@ar-raniry.ac.id

Article:

Received: 23 Oktober 2025

Accepted: 1 November 2025

Published: 2 Desember 2025

© 2023 The Author(s).



This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

Correspondence Address:

khairul.habibi@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim dengan syarat kemampuan fisik, mental, dan finansial yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen pelayanan kesehatan calon jemaah haji di Kota Banda Aceh, termasuk pemeriksaan fisik, vaksinasi, dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan berbasis aplikasi seperti SISKOHAT. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan kesehatan haji berperan penting dalam memastikan kesiapan fisik dan mental jemaah menghadapi tantangan lingkungan Tanah Suci. Sistem informasi kesehatan yang terintegrasi memudahkan pemantauan dan pelaporan kondisi kesehatan. Optimalisasi pelayanan kesehatan berkontribusi pada kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji secara aman dan khushyuk. Dinas Kesehatan Aceh terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui edukasi dan kolaborasi instansi terkait

Kata Kunci: pelayanan kesehatan haji, manajemen kesehatan.

Abstract: Hajj pilgrimage is a mandatory pillar of Islam for Muslims who meet the requirements of physical, mental, and financial capability. This study aims to examine the health service management for prospective hajj pilgrims in Banda Aceh City, including physical examinations, vaccinations, and the utilization of health information systems based on applications such as SISKOHAT. This study employs a qualitative descriptive method with data collection through observation, interviews, and documentation. The results indicate that health service management plays a vital role in ensuring the physical and mental readiness of pilgrims to face the challenges of the Holy Land environment. An integrated health information system facilitates monitoring and reporting health conditions. Optimization of health services contributes to the smooth and successful implementation of the pilgrimage safely and devoutly. The Aceh Health Office continues to improve service quality through education and inter-agency collaboration.

Keyword: hajj health services, health management

Pendahuluan

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat *istita'ah* (mampu) baik secara fisik, mental, dan finansial.(Daruhadi, 2024) Haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka'bah dan dikota Mekkah untuk melaksanakan berbagai ibadah seperti *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah dan sebagainya.(Istianah, 2017) Adapun salah satu syaratnya ialah *istita'ah* yang dilakukan oleh jama'ah haji baik dari fisik sehat secara jasmani dengan tubuh yang mampu menyesuaikan perubahan cuaca yang panas karena kondisi di arab saudi sangat berbeda dengan negara Indonesia.(Istianah, 2017) Istitha'ah kesehatan menjadi krusial karena lebih dari 30% jamaah haji Indonesia berusia lanjut (51-60 tahun), rentan terhadap penyakit degeneratif seperti gangguan kardiovaskular, dan memerlukan perhatian medis intensif untuk memastikan kelancaran ibadah.(Olivia et al., 2025)

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Muslim yang memenuhi syarat kemampuan atau *istita'ah*, baik fisik, mental, maupun finansial.(Akbar & Yazid, 2025) Kondisi fisik jamaah haji sangat berperan penting mengingat situasi lingkungan di Tanah Suci, seperti cuaca panas dan kondisi iklim yang berbeda dibandingkan Indonesia.(Wakhudin, 2025) Oleh karena itu, kesiapan fisik jamaah menjadi faktor utama agar pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan baik dan khushuk. Pelayanan kesehatan jamaah haji merupakan aspek krusial dalam mempersiapkan dan menjaga kondisi kesehatan jamaah sebelum dan selama perjalanan haji. Pelayanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan, perawatan, pembinaan, serta penyuluhan kesehatan untuk memastikan jamaah dalam kondisi prima.(2023, 2021) Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang optimal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ibadah haji, sehingga jamaah tidak hanya sehat secara fisik tetapi juga mental dan mampu menghadapi perubahan lingkungan seperti cuaca, makanan, dan temperatur di Arab Saudi.(Al Mahasin & Muhajarah, 2025)

Manajemen pelayanan kesehatan haji melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna memenuhi kebutuhan kesehatan jamaah.(Purwita et al., 2022) Kerjasama antara puskesmas, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berstandar.

Beberapa kajian terdahulu terkait pelayanan kesehatan jamaah haji menunjukkan bahwa persiapan sebelum keberangkatan haji sangat menentukan kondisi jamaah selama pelaksanaan ibadah.(Deswara, 2023) memberikan pembinaan dan penyuluhan kesehatan kepada calon jamaah haji di suatu daerah dan menemukan bahwa peningkatan edukasi kesehatan mampu menurunkan risiko penyakit pada jamaah.

Penelitian lain membahas dampak kualitas pelayanan kesehatan pra-haji terhadap tingkat kesehatan jamaah saat melaksanakan rukun haji di Arab Saudi. Mulyani menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara pelayanan kesehatan yang baik dengan kemampuan jamaah menjalankan ibadah haji tanpa gangguan kesehatan yang berarti.(Tholabi, 2023)

Selain itu, penelitian lainnya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi kesehatan dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan haji, terutama untuk mengatasi penyakit kronis dan menyesuaikan kondisi fisik jamaah dengan lingkungan baru di Tanah Suci.(2023, 2021)

Konsep dasar ibadah haji sangat berkaitan erat dengan istilah *Istita'ah*, yaitu kemampuan atau kecukupan yang harus dimiliki oleh seorang jamaah untuk dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. *Istita'ah* ini mencakup tiga aspek utama, yaitu

kemampuan jasmani (fisik), rohani (mental), dan finansial (material). (Halimatus Sa'diyah, 2025) Menurut Al-Zaziri (t.th), *istita'ah* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan untuk berhaji. Salah satu aspek yang paling krusial dalam *istita'ah* adalah kemampuan fisik, (Collins et al., 2021) mengingat pelaksanaan ibadah haji dilakukan di lingkungan yang sangat berbeda dengan Indonesia, seperti cuaca yang sangat panas dan kondisi lingkungan yang menuntut kekuatan fisik dan daya tahan. Oleh sebab itu, persiapan fisik yang prima menjadi hal utama agar jamaah mampu menyesuaikan diri dengan tantangan lingkungan tersebut sehingga pelaksanaan ibadah dapat berjalan lancar dan khusyuk.

Menurut Sahlan Asnawi, haji merupakan puncak ibadah bagi umat Islam oleh karena itu haji merupakan lambang setinggi tingginya bagi seorang hamba kepada rabbnya. Menurut Gus Arifin, menyatakan bahwa menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan bagi umat Islam sedunia yang mampu (materil dan fisik) serta aman dalam perjalanan menuju haramain dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji. (Ihsan et al., 2022)

Adapun macam-macam haji ialah Haji ifradh, ialah melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan ihram untuk umrah dan melaksanakan amalan-amalan umrah. *Haji tamattu'*, ialah yang melaksanakan amalan umrah terlebih dahulu kemudian setelah selesai baru melaksanakan ibadah haji. *Haji Qiran*, ialah melaksanakan haji dan umrah sekaligus dengan satu ihram, atau melaksanakan umrah terlebih dahulu kemudian memasukkan haji kedalam umrah sebelum memulai amalan-amalan umrah. (Dr. Ahmad Zuhdi, 2020)

Kualitas pelayanan kesehatan sangat menentukan tingkat kepuasan jamaah haji serta keberhasilan pelaksanaan ibadah secara keseluruhan. kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi dan bahkan melampaui harapan pelanggan sehingga tercipta kepuasan dan loyalitas. (Mulders, 2020) Dalam konteks ini, pemerintah dan semua pihak yang terlibat tidak hanya bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan saja, tetapi juga harus menyediakan edukasi kesehatan yang memadai serta melakukan pembinaan kesehatan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan holistik ini, jamaah akan memperoleh bekal yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan lingkungan seperti cuaca ekstrem, pola makan, dan gaya hidup di Tanah Suci. Fakta ini sangat penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan penuh ketenangan, khusyuk, dan tanpa gangguan kesehatan yang berarti.

Kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada jamaah haji, baik ketika jamaah haji berada di tanah air ataupun di tanah suci tentunya berdampak pada kualitas kondisi kesehatan fisik jamaah haji ketika sedang melakukan ibadah haji. (Depiana et al., 2024) Jika kesehatan jamaah haji terjamin dengan baik maka kegiatan ibadah haji berlangsung dengan baik pula, begitu juga dengan sebaliknya. (Tadbir, 2006) Oleh karena itu, manajemen operasional pelayanan kesehatan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan setiap jamaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan optimal dan meminimalisir risiko kesehatan yang mungkin timbul.

Pelayanan kesehatan ialah pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji untuk menjaga agar kondisi jamaah haji tetap dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam kondisi kurang sehat (sakit) atau menularkan penyakit selama menjalankan ibadah haji. (Depiana et al., 2024) Haji ialah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang

kelima.(Sarwat, 2019) Kewajiban untuk berhaji, minimal sekali dalam seumur hidup diberikan hanya kepada orang muslim yang mampu dalam arti luas, mampu secara jasmani dan rohani.(Sarwat, 2019) Selain itu mampu berarti mampu secara finansial, dalam arti memiliki dana yang diperlukan untuk menjalankan ibadah haji yang dilaksanakan di tanah suci. Dalam Buku fiqih empat mazhab bagian ibadat (puasa, zakat, haji, kurban), Abdurrahman Al-Zaziri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan haji secara bahasa menuju kemuliaan, sedangkan pengertian haji secara istilah adalah amalan-amalan tertentu dan cara tertentu pula. (Musyafak, 2019)

Manajemen pelayanan kesehatan haji memegang peranan strategis dalam memastikan pelayanan kesehatan ini terlaksana dengan efisien dan efektif. Manajemen merupakan proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal.(Rifaldi Dwi Syahputra & Nuri Aslami, 2023)

Manajemen Pelayanan Kesehatan Haji, sesuai dengan yang disampaikan George. R Terry adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan SDM dan sumber-sumber lainnya.(Rifaldi Dwi Syahputra & Nuri Aslami, 2023) Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pengertian pelayanan yang baik ialah kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada jamaah dengan standar yang sudah ditetapkan.

Dalam hal ini, manajemen kesehatan jamaah haji harus mampu merencanakan program kesehatan yang komprehensif, mengorganisasi sumber daya baik tenaga medis maupun fasilitas kesehatan, memberikan pengarahan kepada seluruh pihak terkait, serta melakukan penge-ndalian agar pelayanan berjalan sesuai standar. Dengan manajemen yang baik, kebutuhan kesehatan fisik dan mental jamaah akan terlayani secara maksimal, membantu mereka menghadapi persiapan dan pelaksanaan ibadah dengan kondisi optimal.

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan berkewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan memberi pelayanan kesehatan kepada calon Jamaah haji. Adapun pelayanan kesehatan yang diberikan kepada jamaah haji mencakup tentang pemeriksaan, perawatan, dan pembinaan kesehatan yang diikuti dengan bimbingan dan penyuluhan kesehatan yang diselenggara kan oleh puskesmas Kuta Alam yang telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Kesehatan adalah modal dalam perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi kesehatan yang stabil pencapaian dalam beribadah akan memberikan dampak kurangnya kekhusyukan dalam beribadah.

Untuk mencapai upaya pencegahan dan persiapan yang tepat. Persiapan sebelum keberangkatan mencakup kekuatan fisik dan mental dalam keadaan prima, karena keadaan di Arab Saudi berbeda dengan keadaan di Indonesia, yaitu cuaca dan iklim yang lebih tinggi, keadaan lingkungan yang lebih beraneka ragam, serta jenis makanan yang berbeda dengan Indonesia.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan meningkatkan sumber daya, kerja sama, dan edukasi, diharapkan pelayanan kesehatan terhadap calon jamaah haji di Kota Banda Aceh dapat menjadi lebih optimal. Dinas Kesehatan telah berperan aktif untuk mempersiapkan dan upaya pencegahan dalam menjaga kesehatan jamaah haji dari sebelum pemberangkatan ibadah haji. Persiapan kesehatan yang optimal akan membantu

kelancaran kegiatan ibadah yang akan dikerjakan. Sehingga jamaah haji akan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah haji.

Masalah pelayanan kesehatan jamaah haji di Banda Aceh, yang membedakannya dengan daerah lain, terutama terkait dengan karakteristik sosial dan demografis jamaah haji di daerah ini. Berdasarkan sumber, Banda Aceh memiliki proporsi jamaah haji berusia lanjut yang cukup tinggi, dimana lebih dari 30% jamaah berusia 51-60 tahun dan rentan terhadap penyakit degeneratif seperti gangguan kardiovaskular, diabetes melitus, dan hipertensi. Kondisi ini menuntut pelayanan kesehatan yang lebih intensif dan spesifik, termasuk pemeriksaan awal (*istitha'ah* kesehatan) yang ketat serta pembinaan kesehatan berkelanjutan agar jamaah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca dan lingkungan ekstrem di Arab Saudi. Kemudian pelayanan kesehatan haji di Banda Aceh sangat mengandalkan kolaborasi erat antara puskesmas, dinas kesehatan, dan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kesehatan secara terpadu. Penggunaan sistem komputerisasi terpadu (Siskohatkes) juga menjadi bagian penting dalam memantau dan mengelola data kesehatan jamaah secara efektif. Kondisi geografis dan iklim tropis Banda Aceh yang sangat berbeda dengan Tanah Suci menjadi tantangan tersendiri bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan fisik jamaah.

Dari segi lain dilihat melalui faktor sosial budaya dan kesadaran kesehatan masyarakat di Banda Aceh juga berperan dalam efektivitas pelayanan. Edukasi kesehatan yang intensif dan sifat kepedulian masyarakat yang tinggi membantu meningkatkan kesiapan jamaah, namun tetap ada tantangan terkait kemampuan literasi kesehatan dan adaptasi dengan pola hidup sehat yang harus ditingkatkan hal tersebut bertujuan pemeriksaan kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi adalah terjalannya pemeriksaan, pengobatan, kesehatan jamaah haji sebelum keberangkatan ke tanah suci melalui etika, moral keilmuan dan profesionalisme dengan menghasilkan kualifikasi data yang tepat dan lengkap sebagai dasar pembinaan kesehatan jamaah haji di Indonesia dan pengelolaan kesehatan di Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan strategi tertentu dalam pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik untuk para jamaah haji, sehingga permasalahan kesehatan para jamaah haji akan teratasi dengan baik dan kesehatan para jamaah haji pun akan dipastikan dijamin dengan baik pula.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati secara langsung. (Bogdan, 2020) Pendekatan ini sangat sesuai untuk memahami serta mengetahui secara mendalam kejadian atau fenomena yang dialami oleh subjek penelitian tanpa melakukan analisis hubungan antar variabel, pengujian hipotesis, atau prediksi. (Fiantika Rita Feny, MWasil Mohammad, Jumiyati Sri, Honesti Leli, Wahyuni Sri, 2022)

Penyajian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta lengkap mengenai fenomena yang diteliti dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan realitas secara akurat. Metode deskriptif kualitatif ini tidak mencari sebab-akibat melainkan hanya mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Harahap

et al., 2024)

Lokasi penelitian ini berada di kantor Dinas Kesehatan Aceh, yang terletak di Jalan Kulu II, Suka Ramai, Blower, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Deskripsi lokasi penelitian penting untuk memberikan gambaran konteks geografis dan sosial tempat penelitian dilakukan, sehingga pembaca dapat memahami lingkungan dan kondisi di mana data dikumpulkan. (Iii, n.d.)

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Aceh. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari beberapa sumber berbeda, yaitu hasil wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan, wawancara dengan jamaah haji, serta dokumen resmi yang terkait dengan program pelayanan kesehatan haji. Sedangkan triangulasi teknik menggabungkan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi.

Proses validasi temuan dilakukan dengan cross-check antara hasil wawancara petugas Dinas Kesehatan dengan informasi yang diperoleh langsung dari jamaah haji melalui wawancara serta hasil observasi pelayanan kesehatan di lokasi penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengecek kesesuaian dan konsistensi data sehingga menghindari bias dan memastikan data merefleksikan keadaan sesungguhnya. Misalnya, jika petugas menyampaikan pelaksanaan penyuluhan kesehatan, maka hal tersebut juga dievaluasi dari pengalaman dan persepsi jamaah haji serta observasi aktivitas penyuluhan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan Kesehatan terhadap calon Jamaah Haji

Pendaftaran calon jamaah haji dimulai dengan pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk peraturan pembinaan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi kesehatan jamaah haji. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan tahap pertama diwajibkan untuk setiap jamaah haji dan dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten atau kota, di Puskesmas atau Klinik yang ditetapkan.

Setelah pemeriksaan tahap pertama, status kesehatan jamaah haji ditetapkan sebagai Risiko tinggi atau non-Risiko tinggi. Status kesehatan Risiko tinggi dikriteriakan bagi jamaah sebagai berikut: Berusia 60 tahun atau lebih memiliki faktor kesehatan dan gangguan kesehatan yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk melaksanakan ibadah haji. (Lembaran & Republik, 2016)

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Yunus Arifin, Sekretaris Kesehatan Masyarakat Aceh ia mengatakan bahwa “Sekarang setelah calon jamaah haji mendaftar ia sudah masuk tahap pertama dan sudah masuk tahap masa tunggu kemudian ia akan menunggu untuk beberapa tahun kedepannya, kemudian calon jamaah haji dipanggil oleh Kemenag setahun sebelum keberangkatan haji sudah dihubungi calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji, setelah calon

jamaah haji diberitahukan bahwa mereka sudah masuk panggilan maka ia sudah masuk tahap masa tunggu barulah mereka datang kepuskesmas untuk melakukan pemeriksaan tahap pertama, beda halnya dengan zaman dulu apabila seseorang mempunyai rezeki yang lebih jika ia mendaftar haji tahun ini maka tahu ini pula ia berangkat”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya perubahan disetiap tahun mendatang maka dengan adanya perubahan yang semakin membaik disetiap tahunnya dapat menjadikan lebih baik dan mengevaluasi bagaimana perkembangan jamaah haji yang sudah ditetapkan dan mengontrol perkembangan lebih cepat dan akurat. Maka dengan adanya sistem pelayanan kesehatan yang menggunakan aplikasi lebih mempermudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2016 tentang *Istitaah* Kesehatan Jamaah Haji, hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk mendapatkan istitaah kesehatan atau tidak. (Deswara, 2023)

Jamaah haji memiliki kemampuan fisik untuk menyelesaikan semua ibadah haji yang wajib dan rukun. Status kesehatan jamaah haji tidak akan memburuk karena aktivitas ibadah dan lingkungannya. Kondisi kesehatan jamaah haji dan tindakan yang diperlukan tidak mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji lainnya. Kondisi kesehatan jamaah haji dan tindakan yang diperlukan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Yunus Arifin, SKM ia mengatakan bahwa “Tahap kedua rata-rata hanya pemeriksaan dari tahap pertama dan adanya pemeriksaan vaksinasi Meningitis pemeriksaan ulang untuk memeriksa kesehatan jamaah haji jagan sampai ketika diasrama haji kondisinya jamaah dalam keadaan tidak sehat. Apabila jamaah haji mau berangkat ke Tanah Suci maka akan dihubungi kembali sesuai kloter masing-masing contohnya kloter pertama berangkatnya 12 Mei kalau sesuai jadwal keberangkatan haji, masuk asrama haji nya tanggal 11 kemudian diperiksa kembali kesehatannya untuk menentukan kelayakan terbangnya jagan sampai HB nya di bawah 9, tidak boleh suntik Meningitis pada saat hamil”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang masuk kedalam tahap kedua ini ialah yang sudah diseleksi ditahap pertama yang dalam tahap ini juga diberikan vaksinasi bagi calon jamaah haji untuk kekebalan tubuh jamaah, vaksinasi ini tidak boleh dilakukan pada ibu hamil maka dari itu diadakanya pemeriksaan kembali kepada calon jamaah haji yang belum masuk kategori lansia untuk diperiksa kembali sebelum dilakukan vaksinasi tersebut.

Pembinaan kesehatan haji dimasa keberangkatan yakni pembinaan yang dilakukan bagi jamaah haji setelah jamaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan haji tahap kedua sampai selesai. Kegiatan pembinaan kesehatan haji biasanya dibagi menjadi pembimbing kesehatan haji, penyuluhan kesehatan haji, dan pembinaan terpadu kesehatan haji, yang mencakup seluruh program terintegrasi dan sektor terkait.

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Yunus Arifin, SKM ia mengatakan bahwa “Ketika sudah masuk asrama haji ini adalah tahap ketiga diadakanya pemeriksaan kesehatan kembali untuk memastikan kesehatannya, dan memastikan kembali bahwa tidak ada calon jamaah haji dalam keadaan hamil, jika ada yang ketahuan hamil diasrama haji maka batal untuk keberangkatan jamaah haji, sebenarnya tidak diperbolehkan dalam kondisi hamil hanya untuk penerbangannya bukan untuk melaksanakan ibadah hajinya, perempuan yang berusia subur ada atau tidaknya suami dicek kehamilan kecuali jika dia sudah tua”.

Sebelum dilakukan vaksinasi maka adanya pemeriksaan kehamilan jika terdapat adanya calon jamaah haji yang sedang hamil maka jamaah tersebut dinyatakan tidak dapat berangkat haji dan menunggu waktu yang ditetapkan kembali untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Prosedur pendaftaran calon jamaah haji Indonesia dimulai dengan memenuhi sejumlah persyaratan administratif, seperti beragama Islam, berusia minimal 12 tahun, memiliki KTP dan KK yang masih berlaku, serta membuka tabungan haji di bank resmi yang ditunjuk pemerintah dengan setoran awal tertentu. Setelah syarat administratif terpenuhi, calon jamaah melakukan pendaftaran di Kantor Kemenag kabupaten/kota sesuai domisili, melengkapi dokumen dan mengisi formulir pendaftaran (Surat Pendaftaran Pergi Haji/SPPH). Proses ini juga mencakup verifikasi dokumen oleh petugas Kemenag. Setelah verifikasi selesai, calon mendapatkan nomor porsi haji sebagai tanda bukti pendaftaran yang sah. Menjelang keberangkatan, calon jamaah dipanggil untuk tahap pemeriksaan kesehatan lanjutan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan tenaga medis di puskesmas atau klinik yang ditunjuk. Status kesehatan jamaah dievaluasi melalui pemeriksaan tahap awal (*istitha'ah* kesehatan) untuk menilai kemungkinan risiko tinggi berdasarkan usia dan kondisi medis. Selanjutnya dilakukan vaksinasi dan pemeriksaan ulang untuk memastikan kelayakan jamaah dalam menjalankan ibadah haji di lingkungan dengan cuaca dan kondisi yang sangat berbeda dibanding tanah air. Pemeriksaan kehamilan juga menjadi tahap penting khususnya bagi wanita usia subur.

Pada seluruh proses pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan ini mengacu pada prinsip *istitha'ah* yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan finansial jamaah agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar dan khushuk. Perubahan sistem pendaftaran yang kini lebih terorganisir dan berbasis aplikasi memudahkan pemantauan dan pengelolaan data kesehatan jamaah secara cepat dan tepat. Kerjasama antara berbagai instansi, seperti Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, puskesmas, dan pemerintah daerah, juga memperkuat pelayanan yang terintegrasi dan standar kesehatan jamaah yang terjaga. Dengan prosedur tersebut, jamaah haji bukan hanya dipastikan memenuhi persyaratan legal administratif, tetapi juga fisik dan kondisi kesehatan yang memungkinkan mereka melaksanakan rangkaian ibadah haji tanpa mengganggu kesehatan diri sendiri dan kenyamanan jamaah lain, sebagaimana diwajibkan dalam konsep *istitha'ah*. Ini sejalan dengan nilai penting pelayanan kesehatan haji yang berorientasi pada pencegahan risiko kesehatan serta pembinaan berkelanjutan sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan efektif.

Manajemen Pelayanan Kesehatan terhadap calon Jamaah Haji di Kota Banda Aceh

Dinas Kesehatan haji berperan penting dalam penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan haji, dalam penyelenggaraan sistem pelayanan informasi manajemen memanfaatkan teknologi komunikasi informasi berbasis komputer yang terhubung dengan jaringan internet sehingga mempermudah sumberdata jamaah haji yang diperoleh dari Sistem Komputerisasi Ibadah Haji tersebut yaitu (SISKOHAT) hasil data status kesehatan jamaah berdasarkan pemeriksaan kesehatan haji di Puskesmas dan Rumah Sakit di *input* ke dalam siskohat untuk menganalisis dan memantau kesehatan jamaah haji.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Elfi Parisma S.Kep, SKM, ia mengatakan bahwa : “Sistem pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan bagi jamaah haji untuk mengetahui bagaimana progres berjalannya pelayanan kesehatan ialah melalui aplikasi siskohat yang hanya bisa diakses oleh Dinas kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit. Aplikasi siskohat tidak dapat diakses oleh calon jamaah haji secara personal dikarenakan siskohat hanya dapat digunakan oleh pihak yang berwenang saja”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa yang hanya dapat menggunakan aplikasi siskohat ialah yang hanya memiliki wewenang saja karena aplikasi siskohat tersebut tidak berbentuk umum tetapi merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah penggunaanya untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat aplikasi ini tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak mempunyai wewenang karena aplikasi ini mempunyai ID tersendiri untuk dapat *login* kedalam aplikasi ini.

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Elfi Parisma S.Kep, SKM, ia mengatakan bahwa “Untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan haji mengakses dan menggunakan data kesehatan jamaah haji dapat dilihat melalui aplikasi siskohat tersebut, aplikasi siskohat sudah ada dari tahun sebelumnya akan tetapi tahun 2024 ini aplikasi siskohat lebih diaplikasikan untuk mempermudah pendataan calon jamaah haji secara efektif.”

Untuk menjamin bahwa ibadah haji dapat berlangsung dengan baik, jamaah haji harus memiliki persiapan kesehatan yang baik sebelum keberangkatan. Oleh karena itu, jamaah harus melakukan pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan, yang merupakan lokasi pemeriksaan kesehatan haji. Adapun aspek kesehatan yang dilayani Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh ialah:

Pemeriksaan fisik menjadi salah satu aspek utama dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menghadapi berbagai tantangan selama ibadah di Tanah Suci. Pemeriksaan ini meliputi beberapa komponen penting yang harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

Pertama, pemeriksaan terhadap tanda vital merupakan hal mendasar yang wajib dilakukan. Pemeriksaan ini meliputi pengukuran tekanan darah yang berguna untuk mengidentifikasi kondisi hipertensi atau hipotensi, pengukuran denyut nadi sebagai indikator fungsi jantung dan sirkulasi, pengamatan laju pernapasan yang mencerminkan fungsi sistem pernapasan, serta pengukuran suhu tubuh untuk mendeteksi adanya infeksi atau kondisi demam.

Kedua, penilaian postur tubuh juga penting sebagai bagian dari pemeriksaan fisik awal. Postur ini meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, serta lingkar perut. Pengukuran ini tidak hanya untuk mengetahui status gizi jamaah, tetapi juga sebagai parameter untuk menghitung indeks massa tubuh (IMT) yang berperan dalam menilai risiko kesehatan tertentu seperti obesitas atau malnutrisi yang dapat mempengaruhi kelancaran ibadah haji.

Selanjutnya, pemeriksaan fisik secara langsung dilakukan melalui teknik inspeksi (pengamatan visual), palpasi (perabaan atau penekanan), dan auskultasi (pendengaran menggunakan stetoskop) terhadap beberapa bagian tubuh. Pemeriksaan ini mencakup Kulit, untuk mendeteksi adanya luka, infeksi, atau kelainan seperti alergi dan eksim. Kepala, termasuk pemeriksaan saraf kranial untuk memastikan fungsi saraf tidak mengalami gangguan. Mata, seperti pemeriksaan katarak atau glaukoma yang dapat mengganggu penglihatan jamaah. Infeksi di telinga (seperti otitis media purulenta atau akut), hidung (misalnya sinusitis), tenggorokan, dan mulut yang bisa menjadi sumber gangguan kesehatan selama ibadah. Leher dan pembuluh getah bening yang diperiksa untuk mendeteksi pembengkakan atau tanda infeksi sistemik.

Pemeriksaan fisik terhadap dada (*toraks*) dan perut (*abdomen*) juga dilakukan dengan seksama. Pada toraks, pemeriksaan paru-paru dan jantung menjadi fokus utama untuk memastikan fungsi pernapasan dan sirkulasi berjalan normal tanpa ada gangguan penyakit kronis seperti asma, bronkitis, atau penyakit jantung. Sedangkan pemeriksaan perut meliputi pengecekan organ-organ dalam perut guna mengidentifikasi adanya keluhan atau penyakit yang dapat mengganggu kesehatan jamaah. Selain itu, pemeriksaan fisik juga menyentuh bagian ekstremitas, yaitu pemeriksaan kekuatan otot serta refleks neurologis untuk memastikan tidak ada gangguan saraf atau otot yang dapat menghambat mobilitas jamaah. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan jamaah memiliki kekuatan fisik yang memadai untuk melakukan aktivitas ibadah.

Pemeriksaan tambahan meliputi pemeriksaan area rektum dan urogenital yang meliputi inspeksi dan palpasi, serta pemeriksaan traktus urinarius dan traktus genitalia untuk mendeteksi kemungkinan gangguan kesehatan pada organ-organ reproduksi dan saluran kemih yang mungkin tidak tampak secara kasat mata, namun berdampak pada kondisi kesehatan umum jamaah haji.

Keseluruhan pemeriksaan fisik ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa calon jamaah haji dalam kondisi fisik yang baik, ready untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang berat dan membutuhkan stamina serta daya tahan yang tinggi di lingkungan baru yang berbeda kondisi iklim dan geografisnya dengan Indonesia. Pemeriksaan menyeluruh ini diharapkan dapat mendeteksi sejak dini adanya penyakit atau kelainan agar segera mendapatkan penanganan tepat sehingga jamaah dapat berangkat dan melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan khusyuk.

Narasi ini berdasarkan standar teknis pemeriksaan kesehatan jamaah haji yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Petunjuk Teknis PERMENKES Nomor 15 Tahun 2016 dan berbagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji. Pemeriksaan penunjang kesehatan calon jamaah haji merupakan bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan kesehatan jamaah sebelum melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Berdasarkan Petunjuk Teknis PERMENKES Nomor 15 Tahun 2016, pemeriksaan penunjang meliputi beberapa komponen utama yang wajib dilakukan.

Komponen pertama adalah pemeriksaan laboratorium yang mencakup berbagai tes darah seperti darah lengkap, golongan darah dan rhesus, serta kimia darah yang terdiri dari pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah dua jam setelah makan. Selain itu, pemeriksaan profil lemak juga dilakukan untuk menilai risiko penyakit kardiovaskular yang dapat memengaruhi kesehatan jamaah selama menjalankan ibadah haji.

Selain tes darah, pemeriksaan urine lengkap juga menjadi bagian dari pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perubahan warna, bau, kejernihan urine, serta kandungan sedimen, glukosa, dan protein yang bisa menjadi

indikasi gangguan fungsi ginjal atau infeksi saluran kemih. Pemeriksaan kehamilan wajib dilakukan bagi calon jamaah haji wanita usia subur untuk memastikan kondisi kesehatan ibu hamil, karena kehamilan merupakan faktor yang memerlukan perhatian khusus saat pelaksanaan ibadah haji. Pemeriksaan radiologi berupa rontgen, terutama *rontgen thoraks* (dada), digunakan untuk mendeteksi adanya gangguan pada paru-paru atau jantung, serta penyakit menular seperti tuberkulosis yang perlu ditangani sebelum keberangkatan. Terakhir, pemeriksaan elektrokardiografi (EKG) diperlukan untuk membantu memastikan diagnosis penyakit jantung atau gangguan irama jantung, yang sangat penting untuk menghindari risiko komplikasi selama menjalankan ibadah haji.

Vaksinasi haji merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh calon jamaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Berdasarkan Petunjuk Teknis PERMENKES Nomor 15 Tahun 2016, vaksinasi haji mencakup imunisasi terhadap Meningitis Meningokokus Tetrevalent yang bertujuan untuk mencegah penularan penyakit menular yang berpotensi menyebar di lingkungan padat jamaah haji. Vaksin ini juga berfungsi untuk memutus rantai penyebab dan penularan penyakit tersebut. Selain itu, imunisasi influenza musiman juga diberikan terutama karena saat musim haji, kerumunan padat dan kondisi fisik yang menurun membuat risiko penularan influenza menjadi sangat tinggi, terutama pada jamaah lansia dan yang rentan terhadap penyakit.

Vaksinasi meningitis dan influenza memerlukan waktu tertentu untuk membentuk kekebalan tubuh yang efektif. Imunisasi influenza dapat diberikan bersamaan dengan imunisasi meningitis, namun vaksinasi harus disuntikkan pada bagian tubuh yang berbeda agar efektif. Selain vaksin meningitis dan influenza, aturan terbaru untuk tahun 2025 menambahkan kewajiban *vaksin poliovirus* (polio) bagi jamaah haji, yang menjadi persyaratan dari Pemerintah Arab Saudi. Vaksin polio harus diberikan minimal 2-4 minggu sebelum keberangkatan dan dapat diberikan bersamaan dengan vaksin meningitis dan influenza, namun tetap pada lokasi injeksi yang berbeda. Vaksin polio ini penting untuk mencegah kasus polio yang mungkin masih ada di negara asal jamaah dan untuk meminimalisir risiko penularan selama pelaksanaan ibadah haji yang melibatkan jamaah dari berbagai negara dengan kondisi kesehatan yang beragam.

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara dengan Bapak Yunus Arifin, SKM ia mengatakan bahwa “Jika jamaah haji sudah kembali ketanah air maka adanya dilakukan pemantauan kesehatan terhadap calon jamaah haji ditahap pertama apakah calon jamaah haji ada membawa pulang penyakit atau tidak, dilakukannya observasi terhadap calon jamaah untuk memastikan kembali bahwa mereka pulang dalam keadaan sehat, namun jika ada jamaah dalam kondisi sakit dan harus dirujuk kerumah sakit maka akan dibawa kerumah sakit seperti pasien pada umumnya bukan lagi sebagai jamaah haji. Namun jika ditahap pertama adanya jamaah ditemukan masalah kesehatan pada jamaah haji misalnya masalah pada jantung, paru-paru, dan lain sebagainya maka sudah adanya dibentuk SK rujukan untuk haji dirumah sakit Meuraksa dan Cempaka Lima”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jika calon jamaah haji tiba di tanah air ditahap pertama dan tidak terdapat gejala penyakit maka calon jamaah haji tersebut dinyatakan sehat tetapi jika jamaah tersebut ditahap pertama terdapat kendala dalam kesehatan misalnya masalah pada jantung, paru-paru maka sudah adanya terbentuk SK rujukan kerumah sakit yang sudah ditujukan.

Oleh karena itu, manajemen pelayanan kesehatan calon jamaah haji di Banda Aceh berjalan melalui sistem pelayanan yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi,

yaitu aplikasi Sistem Komputerisasi Ibadah Haji (SISKOHAT). Aplikasi ini mempermudah penginputan, pemantauan, dan analisis data kesehatan jamaah yang diperoleh dari pemeriksaan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sehingga akses data menjadi lebih cepat dan akurat. Namun, akses aplikasi ini dibatasi hanya untuk pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit, sehingga menjaga kerahasiaan dan keamanan data kesehatan jamaah. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji meliputi beberapa tahap penting dengan pemeriksaan fisik yang komprehensif, mulai dari tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh; penilaian postur tubuh dan pengukuran indeks massa tubuh; hingga pemeriksaan lebih rinci seperti inspeksi kulit, mata, telinga, leher, dada, perut, ekstremitas, serta organ reproduksi dan saluran kemih. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kesiapan fisik jamaah untuk menghadapi tantangan iklim dan kondisi di Tanah Suci yang berbeda dengan Indonesia. Penunjang pemeriksaan seperti laboratorium darah, urine, rontgen dada, dan elektrokardiografi juga dijalankan untuk mendeteksi risiko penyakit kronis dan infeksi yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah.

Vaksinasi menjadi bagian protokol kesehatan penting dengan imunisasi terhadap meningitis, influenza musiman, dan terbaru poliovirus sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi, yang diberikan secara terjadwal dan dengan mekanisme khusus bagi jamaah wanita usia subur melalui pemeriksaan kehamilan untuk memastikan keamanan vaksinasi dan keberangkatan. Setelah kepulangan dari Tanah Suci, jamaah yang mengalami masalah kesehatan dirujuk ke rumah sakit dan terus dipantau kondisinya. Sistem rujukan yang jelas terbentuk di Banda Aceh dengan rumah sakit rujukan khusus untuk jamaah haji yang menghadapi kondisi kritis. Manajemen pelayanan kesehatan demikian sudah sesuai dengan konsep *istita'ah* yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan finansial agar jamaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan khushyuk dan lancar. Penggunaan SISKOHAT sebagai sistem terpadu dan kolaborasi antar lembaga telah membantu optimalisasi pelayanan sehingga menyelenggarakan pemeriksaan yang komprehensif, monitoring yang berkesinambungan, dan pembinaan kesehatan yang menyeluruh.

Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan calon jamaah haji di Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji.

Manajemen pelayanan kesehatan calon jamaah haji di Banda Aceh perlu terus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sistem Komputerisasi Ibadah Haji (SISKOHAT) yang sudah menjadi tulang punggung dalam pengelolaan data kesehatan jamaah secara terpadu dan akurat. Dengan sistem ini, penginputan data, monitoring kesehatan, dan analisis status risiko kesehatan jamaah dapat dilakukan dengan lebih efisien oleh pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan yang komprehensif, termasuk pemeriksaan fisik lengkap, laboratorium, dan vaksinasi wajib, harus dilakukan sesuai standar untuk memastikan kesiapan fisik jamaah menghadapi tantangan lingkungan di Tanah Suci. Sistem rujukan yang jelas ke rumah

sakit khusus bagi jamaah dengan masalah kesehatan serius harus terus dipelihara agar penanganan medis dapat segera diberikan.

Pentingnya pelaksanaan pemeriksaan kehamilan dengan ketat bagi calon jamaah haji wanita usia subur sebelum dilakukan vaksinasi. Jika ditemukan calon jamaah haji dalam kondisi hamil, maka jamaah tersebut tidak diperkenankan berangkat haji dan harus menunggu waktu yang ditetapkan kembali sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini memiliki tujuan untuk memastikan keamanan dan kesehatan jamaah selama pelaksanaan ibadah, menghindari risiko komplikasi akibat vaksinasi, serta menjaga kelancaran ibadah tanpa hambatan medis. Implementasi prosedur ini sejalan dengan konsep *istita'ah* yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan finansial jamaah agar ibadah haji bisa dilaksanakan wajar, lancar, dan khushyuk. Integrasi teknologi informasi dan sinergi antar lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji, memastikan jamaah tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga benar-benar siap secara medis dan psikologis untuk menjalankan ibadah dengan optimal.

Referensi

- Alfi Alfarizhi Hidayat, & Imamul Muttaqin. (2024). Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam (Pengertian, Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah, Karakteristik Kepemimpinan Islam dan Keberhasilannya). *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 1(4), 173–185. <https://doi.org/10.62383/katalis.v1i4.962>
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan Pkn*, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Dusturiyah, N., Jannah, D. H., Hasanah, L. N., & Astuti, R. P. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 500–503.
- Firdaus, I., Ardiarta, N., & Mu'is, A. (2023). Penerapan+Akad+Musyarakah+Dalam+Pembiayaan+Usaha+Di+Bank+Syariah. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–10.
- Fitria, H., Hakim, M. L. Al, & Astuti, R. P. (2025). Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Mikro Kecil (UMKM) Sebagai Shahibul Maal Produk Mudharabah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 197–206. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/253%0Ahttps://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/download/253/246>
- Iii, B. A. B., Pendekatan, A., & Penelitian, J. (n.d.). *Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 37. *Ibid.*, 4. 48. 48–54.
- Imawan, D. H., Indonesia, U. I., Rahman, Y. A., Indonesia, U. I., Rakhmawati, R., Indonesia, U. I., & Divoice, P. (2022). *Peningkatan Kualitas Hidup Islami Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi, Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, YUSDANI, UUN Zahratun Nisa, Dzulkipli Hadi Imawan, dan Rakhmawati Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin*, (Issue January).
- Khairunnisa, & Ahmadi. (2024). Karakteristik dan Nilai-Nilai Kepemimpinan Rasulullah SAW dalam Persektif Islam. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 03(02), 3031–9498.
- Ma'ruf, & Suriyanto. (2021). *Kepemimpinan Rasuli*. 25.
- Muhammad Nur Kurma. (2024). Model Kepemimpinan Spiritual-Transformasional dalam

- Penguatan Budaya Mutu di Lembaga Pendidikan Islam. *IslamicEdu Management Journal*, 1(2), 173–184. <https://doi.org/10.71259/ha7cr224>
- Penelitian, I. (2025). *a Kuntabilitas Sosial Dalam Analisis Kepuasan Nasabah*. Publising, K. A. (2025). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5051>. 2(4).
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>
- Rahmat, & Ahmad. (2020). Manajemen Kepemimpinan Islami Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Ud Iqbal Jaya Bondowoso. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 128–141. <https://doi.org/10.35316/idarah.2020.v1i2.128-141>
- Takwim, A., Lestari, D., Maharani, F. N., Prasetya, I., & Anggraeni, L. S. (2024). Inovasi Produk Dan Layanan Keuangan Syariah Di Era Digital. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 205–213. <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jeb>
- Taylor, B. (20 C.E.). Metode Penelitian. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology.*, 37–47.
- Undang-Undang. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Kup. *Direktorat Jenderal Pajak*, 2007(235), 245.